

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES  
ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
(Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)**



**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2017**

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES  
ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
(Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**



**2017**

## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi Oleh ISMAIL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Ponorogo, 2017

Pembimbing I

Drs. H. Sulton, M.Si  
NIP.19650814200501100

Pembimbing II,

  
Prima Sinta Utami, M.Pd  
NIK. 199104120160913

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh ISMAIL  
Telah dipertahankan dihadapan TIM PENGUJI  
Pada tanggal , 22 juli 2017

Tim Penguji,

Drs. H. Sulton, M.Si  
NIP .19650814200501100

Ketua

Prihma Sinta Utami, M.Pd.  
NIK .1991040120160913

Anggota

Hadi Cahyono, M.Pd.  
NIK . 1989022120141013

Anggota

Mengetahui,  
Kaprodi Pend. Pancasila dan  
Kewarganegaraan

Hadi Cahyono, M.Pd.  
NIK.1989022120141013

a.n. Dekan Fak. Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan  
Wakil Dekan



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL  
NIM : 13311904  
Jurusan : PPKn

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Juni 2017

Yang membuat pernyataan



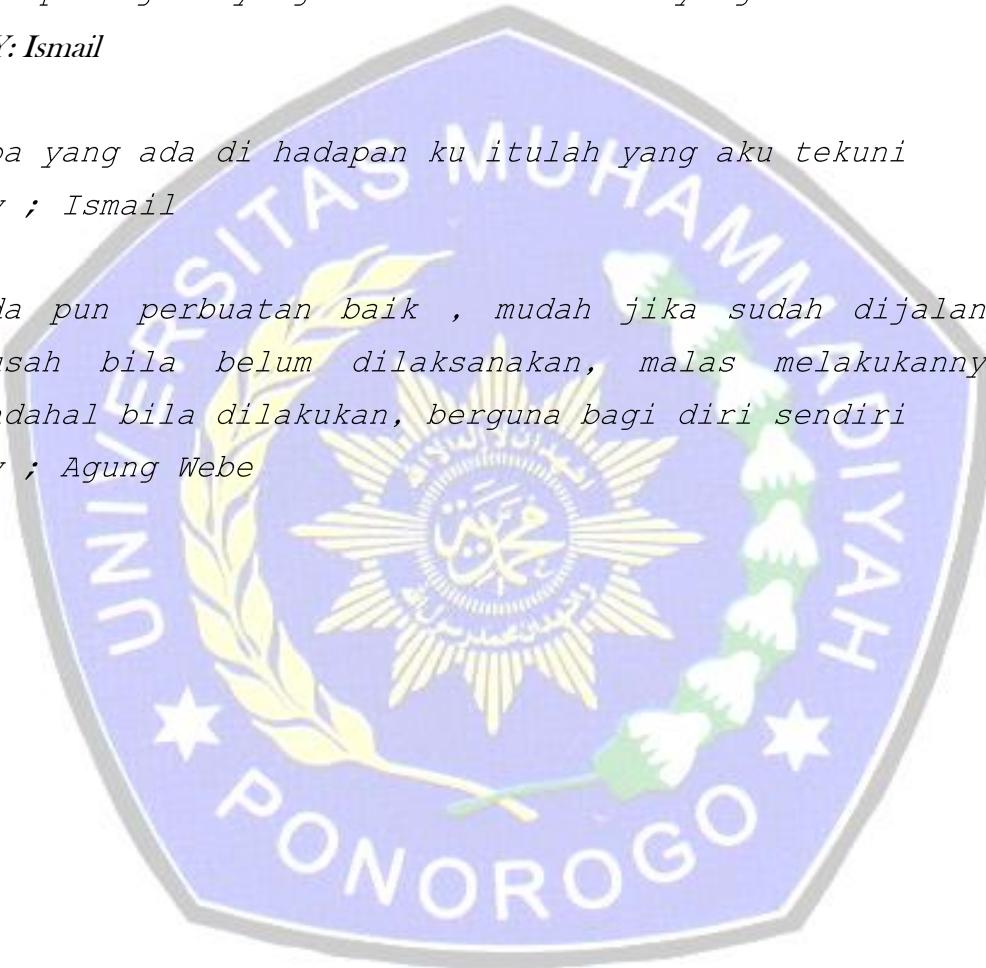
## MOTTO

**“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”(Q. S. [13]: 11)**

*Tetap menjadi yang terbaik diantara yang baik*  
*BY: Ismail*

*Apa yang ada di hadapan ku itulah yang aku tekuni*  
*By ; Ismail*

*Ada pun perbuatan baik , mudah jika sudah dijalani,  
susah bila belum dilaksanakan, malas melakukannya,  
padahal bila dilakukan, berguna bagi diri sendiri*  
*By ; Agung Webe*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya-lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Sekaligus ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa memperjuangkan dan mendo'akan yang tiada hentiterucap disetiap langkahku.
2. Ku persembahkan kepada rakyat Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
3. Kepada teman-teman pemuda Desa Tegalombo.
4. Kepada MAM 01 Tegalombo.
5. Kepada IMM DjazmanAlkindi.
6. Kepada Desa Tercintaku Gedangan.
7. Kepada adek-adekku se kos di Masjid Al- Djazuli.
8. Kepada seluruh guruku mulai kelas 1 samapi saat ini.
9. Kepada Bangsaku Tercinta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Tugas akhir ini yang berjudul “Implementasi Prinsip *Checks and Balances* Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)”. Sebagai syarat kelulusan dan memperoleh Gelar Strata Satu (S-1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Sulton, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Drs. Jumadi M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Hadi Cahyono, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Drs. H. Sulton, M.Si dan Ibu Prihma Sinta Utami, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan segenap waktu, motivasi dan bimbingannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan banyak ilmu.

5. Kepala Desa Tegalombo Kabupaten Pacitan, beserta perangkat-perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah membantu dalam proses penelitian.
6. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga amal Bapak, Ibu dan rekan-rekan mendapatkan balasan yang sepadasnya dari Allah SWT. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan tugas akhir ini, walaupun telah melalui tahap perencanaan penyusunan, dan revisi tapi masih ada yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu saran-saran yang membangun diterima dengan senang hati teriring ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Ponorogo,

Penyusun

**ISMAIL**

## ABSTRAK

Ismail.2017."*Implementasi Prinsip checks and balances Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa(Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)".* Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (I) Drs. Sulton, M.Si (II) Prihma SintaUtamiM.Pd

**Kata Kunci :** *Prinsip Checks and Balances, Penyusunan Peraturan Desa*

Agenda besar reformasi adalah menghendaki sistem pemerintahan Negara Indonesia berbentuk desentralisasi yaitu suatu pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Munculnya otonomi daerah ditandai dengan terbitnya UU No 22 Th 1999, kemudian direvisi menjadi UU No 32 Th 2004, dan disempurnakan menjadi UU No 23 Th 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi desa yang dimiliki hal ini dikuatkan dengan diterbitkannya UU No 6 Th 2014 Tentang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui implementasi prinsip *checks and balances* Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa, 2). Untuk mengetahui implementasi prinsip *checks and balances* Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam pembahasan rancangan peraturan desa, 3). Untuk mengetahui implementasi prinsip *checks and balances* Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam penetapan rancangan peraturan desa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif obyek penelitian di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Dalam penyusunan rancangan peraturan desa belum terjadi *checks and balances* karena rumusan peraturan desa didominasi oleh pemerintah desa dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak berdaya mengusulkan rancangan peraturan desa ada tiga faktor yang menyebabkan ketidak berdayaan Badan Permusyawaratan Desa diantaranya: Kesibukan anggotanya, Lemahnya pendidikan politik sehingga terjadi kesalahan persepsi terkait dengan posisi dan tugasnya, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak punya perangkat administrasi dan pedoman kaitanya dengan tugas dan kewenangannya, 2). Dalam pembahasan rancangan peraturan desa belum terjadi *checks and balances* karena Badan Permusyawaratan Desa tidak ada upaya untuk mengontrol rancangan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa, katidak berdayaan ini disebabkan karena BPD tidak punya perangkat pedoman penyusunan peraturan desa hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik, 3). Dalam penetapan peraturan desa belum terjadi *checks and balances* karena peraturan yang di tetapkan meskipun Badan Permusyawaratan Desa menyetujui akan tetapi rancangan peraturan yang disetujui kurang memuat asas-asas : mengayomi, keadilan, kesamaan, ketertiban, dan keseimbangan. Yang intinya belum mampu menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

## ABSTRACT

Ismail.2017 "Implementation Principles of checks and balances Between Village Consultative Bodies With Village Government In Preparation of Village Rules (Case Study of Tegalombo Village, Tegalombo Sub-district, Pacitan Regency)". Thesis, Study Program of Pancasila Education and Citizenship, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University Ponorogo. Supervisor (I) Drs. Sulton, M.Si (II) Prihma Sinta Utami M.Pd

**Keywords:** *Principles of Checks and Balances, Village Rules Preparation*

The great agenda of reform is the government system of the State of Indonesia in the form of decentralization that is a government that gives authority to the regions to manage their own households. The emergence of regional autonomy is marked by the issuance of Law No. 22 Th 1999, then revised into Law No. 32 Th 2004, and refined into Law No. 23 Th 2014. Regional autonomy gives authority to the village to manage the potential of the village owned by this is reinforced by the issuance of Law No. 6 Th 2014 About Village. The purpose of this research is; 1). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in drafting the village regulations, 2). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in the discussion of village regulations draft, 3). To know the implementation of the principle of checks and balances of the Village Consultative Body with the village government in determining the village regulation draft. The type of this research is qualitative research object in Tegalombo Village, Tegalombo District Pacitan Regency, the type of research used is case study, the procedure used to collect data is observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study are: 1). In the preparation of village regulation draft has not happened checks and balances because the formulation of village regulations is dominated by the village government where the Village Consultative Council is powerless to propose the draft of village regulations there are three factors that menyebapkan the empowerment of the Village Deliberation Agency include: Anggaa Angotanya, weakness of political education resulting perception errors In relation to its position and duties, and the Village Consultative Body does not have administrative and kaitanya communication with its duties and authorities, 2). In the discussion of the village regulation draft, there have been no checks and balances since the Village Consultative Board has no effort to control the village regulation draft proposed by the village government. This empowerment is not permitted because BPD does not have a set of rules for the preparation of village regulations because it lacks political education 3) . In the determination of village regulations there has not been any checks and balances due to the regulations set forth although the Village Deliberative Council agreed but the approved draft regulation does not contain the following principles: protection, justice, equality, orderliness, and balance. The core has not been able to prosper the community as a whol.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PESERTUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. <i>Checks and Balances</i> .....	10
1. Esensi <i>Checks and Balances</i> .....	10
2. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> dalam pemerintahan desa	12
B. Pemerintahan Desa .....	14
1. Pengertian pemerintahan Desa .....	14
2. Pemerintah Desa .....	15
3. Kepala Desa .....	16
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	18
C. Mekanisme Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan desa .....	19
1. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa.....	20

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa .....	21
3. Penetapan Dan Pengesahan Peraturan Desa .....	22
D. Penelitian Terkait .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Kehadiran Peneliti.....	29
C. Tahapan-tahapan Penelitian .....	29
1. Tahap Pra Lapangan .....	29
2. Tahap Pekerjaan Lapangan.....	32
D. Lokasi Penelitian .....	35
E. Subyek Penelitian .....	37
F. Sumber Data .....	37
G. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
H. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Sejarah Singkat Desa Tegalombo .....	41
2. Demografi Desa Tegalombo .....	42
3. Kondisi ekonomi Desa Tegalombo .....	48
4. Sarana Prasarana .....	49
5. Struktur pemerintahan Desa Tegalombo.....	51
6. Badan Permusyawaratan Desa .....	52
B. Hasil Penelitian .....	53
1. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam menyusun rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	53
2. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam membahas rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	61

3. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam menetapkan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacita .....	72
a. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi dan penjaringan aspirasi masyarakat Desa Tegalombo ..	81
b. Persepsi masyarakat terhadap produk peraturan desa .....	88
C. Pembahasan .....	92
1. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam persiapan pembentukan peraturan desa di Desa Tegalombo .....	93
2. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam membahas rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo .....	97
3. Implementasi prinsip <i>checks and balances</i> Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam penetapan dan pengesahan rancangan peraturan desa di Desa Tegalombo.....	102
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
DAFAR PUSTAKA	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Daftar Nama-nama Kepala Desa Tegalombo.....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Tegalombo .....	43
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Umur.....	43
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tegalombo .....	47
Tabel 4.4	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan Desa Tegalombo .....	48
Tabel 4.5	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tegalombo.....	49
Tabel 4.6	Pejabat pemerintah Desa Tegalombo Tahun 2017.....	51
Tabel 4.7	Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tegalombo Tahun 2017.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	24
Gambar 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa .....	24



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Lampiran | 1 | Instrumen Penelitian  |
| Lampiran | 2 | Identitas Informan  |
| Lampiran | 3 | Surat Izin Penelitian   |
| Lampiran | 4 | Surat Keterangan Penelitian   |
| Lampiran | 5 | Foto wawancara  |
| Lampiran | 6 | Absensi ikut serta dalam rapat  |
| Lampiran | 7 | Peta Desa Tegalombo   |
| Lampiran | 8 | Peraturan daerah kanupatenpacitannomer 5 tahun 2008 tentang pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa |

